



RTP

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGENDALIAN RESIKO

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-tindak-pengendalian-resiko-2021/>



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id

Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU - 78711

2021

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

Nama OPD	: Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat	: Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau
Nama Pimpinan	: RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Visi	: Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
Misi	: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas 2. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan
Tujuan	: 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif
Anggaran Tahun 2020	: 9.102.182.835,00
Anggaran Tahun 2021	: 9.602.011.770,00
Jumlah Program	: 2 Program
Jumlah Kegiatan	: 8 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 30 Sub Kegiatan

Kode			Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	2	3	4	5
01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

Kode			Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	2	3	4	5
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
02			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	√
02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	√
02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	√
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	√
02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	√
02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√

REGISTER RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

FORM MR-1

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/ Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Koordinasi antar Instansi lemah	Bid. Penegakan & Operasi	Eksternal	Controllable	Ego sektoral
			Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Bid. Penegakan & Operasi	Eksternal	Controllable	Kurangnya Sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang tidak merata.
			Tidak Adanya Tenaga PPNS	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Terbatasnya Sumber Daya Manusia
			Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
			Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Proses revisi perda membutuhkan waktu dan biaya
			Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Tidak ada gaji, resiko kerja tinggi, dan performa tidak menarik
			Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Kurangnya kesadaran arti penting menjaga kondisi lingkungan yang aman dan kondusif
			Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Keterbatasan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable/Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Peserta tidak siap untuk mengemban tugas sebagai Jafung
			Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Identifikasi dan Penafsiran Kerugian Materi dan Cidera

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan Sasaran

Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran

Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran

Kolom (5) : diisi dengan siapa pemilik resiko (bidang/bagian)

Kolom (6) : diisi dengan "Internal/Eksternal"

Kolom (7) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"

Kolom (8) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Putussibau, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

FORM PENILAIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

FORM MR-2

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Koordinasi antar Instansi lemah	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	3	5	15	Sedang
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	5	1	5	Sangat Rendah
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	4	2	8	Rendah
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	5	5	25	Sangat Tinggi-Dimitigasi
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	3	2	6	Rendah
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
8	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	3	3	9	Rendah
9	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	4	3	12	Sedang
10	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
12	Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	3	3	9	Rendah

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko dari sheet sebelumnya

Kolom (3) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4)

Kolom (6) : deskripsi status risiko yaitu ; Sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah

Putussibau, Januari 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

FORM MR-3

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koordinasi antar Instansi lemah		Mengurangi Resiko	Rapat Koordinasi Antar Instansi Pelaksana	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
2	Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Kurang	Patroli Pagi, siang dan Malam	Mengurangi Resiko	Melakukan Sosialisasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
				Pembinaan	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
				Penindakan	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
3	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Mengusulkan tenaga PPNS dari Luar Instansi POL PP	Menerima Resiko	Menyurati BKPSDM	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Januari 2021
4	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai	Mengusulkan setiap tahun anggaran	Efisiensi Kinerja	Mengusulkan Anggaran	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
5	Jumlah Anggota Operasional Belum Memadai	Optimalisasi pemerataan pembebanan tugas	Membagi Resiko	Penambahan Anggota	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Sepanjang Tahun
6	Kurangnya sosialisasi tentang Perda-Perda kepada Masyarakat	Melakukan Penyuluhan	Mengurangi Resiko	bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melakukan sosialisasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
7	Perda yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	mengusulkan revisi perda	Menerima Resiko	melakukan revisi Raperda	Bid. Penegakan dan Operasi	Triwulan IV

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang		Mengurangi Resiko	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar membuat aturan terkait harus menganggarkan Gaji Linmas dalam Anggaran Desa	Bid. Perlindungan Masyarakat	Sepanjang Tahun
9	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		Mengurangi Resiko	Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa	Bid. Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Personil	Triwulan II dan III
10	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas		Mengurangi Resiko	Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar Desa Menganggarkan Peralatan dan Perlengkapan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat	Triwulan I
11	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada		Mengurangi Resiko	Membuat surat Pernyataan dan Teguran/ pembinaan bahwa seluruh PNS Satpol PP Wajib Jafung	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Triwulan I
12	Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Mengurangi Resiko	Membuat Perbub tentang Standar Pembayaran Kerugian Materi dan Cidera	Bi. Penegkna dan Operasi	Triwulan I

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risiko

Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten/bidang pemilik risiko sesuai permasalahan yang

Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian

Putussibau, Januari 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Dampak					Tingkatan	Level Risiko	Range Risiko	Warna
			1	2	3	4	5				
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan				
Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25	5	Sangat Tinggi	$20 \leq X \leq 25$	
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20	4	Tinggi	$12 \leq X < 20$	
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15	3	Sedang	$05 \leq X < 12$	
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10	2	Rendah	$03 \leq X < 05$	
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5	1	Sangat Rendah	$01 \leq X < 03$	